

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Jasa auditing digunakan secara meluas dikalangan pengusaha, pemerintah dan organisasi nirlaba (yang tidak mencari keuntungan) lainnya. Bahasan singkat mengenai alasan ekonomi yang mendorong diperlukannya auditing akan membantu untuk memahami mengapa audit begitu diperlukan dan bagaimana permasalahan hukum yang biasa dihadapi auditor. (Arens & Loebbecke, 1996:7).

Kantor Akuntan Publik melaksanakan empat jenis jasa utama (Arens & Loebbecke, 1996 : 12-13), yaitu :

- a. Jasa attestasi, yang meliputi semua kegiatan dimana kantor akuntan publik mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keadaan asersi tertulis yang telah dibuat dan ditanggungjawabinya pihak lain.
- b. Jasa perpajakan, dimana Kantor Akuntan Publik menyusun surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan dari perusahaan dan perorangan, baik yang merupakan klien audit maupun yang bukan.
- c. Jasa konsultasi manajemen, Kantor Akuntan Publik memberikan jasa tertentu yang memberi kemungkinan pada kliennya untuk meningkatkan efektifitas operasinya.

d. Jasa akuntansi dan pembukuan, banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada Kantor Akuntan Publik.

Sejak abad ke 15, profesi auditing mulai dilakukan di Inggris. Asal muasal profesi ini berdiri sebenarnya dipertanyakan para ahli, namun sejalan dengan semakin meluasnya perkembangan perekonomian memaksa para pemilik modal untuk memeriksa kelayakan atau kebenaran laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban dari para pengelola dana. Disinilah peran para auditor mulai dibutuhkan sebagai pihak independen yang bertugas untuk memeriksa kelayakan laporan keuangan tersebut (Sofyan Safri, 1991:27).

Auditing merupakan proses yang sistematis, yaitu berupa rangkaian langkah atas prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisir (Mulyadi, 1998). Dalam melaksanakan audit seorang akuntan yang bertindak sebagai auditor harus merencanakan sedemikian rupa sehingga resiko audit yang ada selama pelaksanaan prosedur audit dapat dibatasi pada tingkat yang paling rendah, yang menurut pertimbangan profesionalnya memadai untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan.

Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur, dimana informasi tersebut memiliki berbagai bentuk, sehingga memungkinkan auditor untuk mengaudit hal-hal seperti laporan keuangan perusahaan, jumlah waktu yang dibutuhkan seorang karyawan untuk menyelesaikan tugas, total biaya kontrak konstruksi

pemerintah, dan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) perseorangan (Arens & Loebbecke, 1996:1).

Auditor merencanakan audit untuk mencapai keyakinan yang memadai guna mendeteksi adanya salah saji (*mis statement*) material yang jumlahnya cukup besar baik secara individu maupun secara keseluruhan, dimana secara kuantitatif berdampak besar terhadap laporan keuangan yang dalam pelaksanaan auditing seringkali resiko audit tidak dapat dihindarkan sehingga resiko audit akan selalu menyertai dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan resiko suatu akun atau golongan transaksi yang berhubungan dengan salah saji, maka seorang auditor dalam usahanya untuk menurunkan tingkat resiko audit tersebut haruslah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : memilih prosedur yang efektif, melaksanakan prosedur audit yang lebih dekat dengan tanggal neraca, atau memperluas prosedur audit tersebut. Auditor harus berusaha membatasi resiko audit pada tingkat yang sedemikian rupa terhadap saldo akun atau golongan transaksi sehingga pada saat penyelesaian audit memungkinkan untuk menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan secara menyeluruh dengan tingkat resiko audit yang cukup rendah.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka yang memegang peranan cukup penting untuk menurunkan tingkat resiko sangat berkaitan dengan prosedur audit yang diterapkan. Menurut Mulyadi (1998) prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu melaksanakan audit. Prosedur audit itu meliputi inspeksi, wawancara, konfirmasi, pengamatan, pengusutan, pemeriksaan bukti pendukung, perhitungan dan penelaahan secara cepat (*scanning*) terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur-

unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam (Mulyadi, 1998:82-84).

Dari sudut resiko audit maka pelaksanaan prosedur audit yang baik dan efektif akan berkaitan dengan resiko deteksi audit, karena resiko deteksi audit merupakan fungsi dari efektifitas prosedur audit, Menurut Gerloff (185:155, dalam Dwi Sulistyaningsih, 2003) efektifitas berfokus pada perhatian terhadap sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan dijalankannya prosedur tersebut. Sedangkan menurut Standart Profesional Akuntan Publik menyebutkan bahwa resiko deteksi merupakan bentuk resiko dimana auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat pada suatu asersi (IAI 2001, 312.8 par 30).

Resiko ini timbul karena adanya sebagian ketidakpastian yang ada pada saat auditor tidak melaksanakan sepenuhnya pemeriksaan terhadap saldo akun atau golongan transaksi. Dan resiko ini selalu mendampingi auditor dalam menjalankan tugasnya dan karena sifatnya maka auditor berusaha untuk meminimalkan semua resiko deteksi audit ini.

Dari latar belakang pemikiran tersebut maka auditor harus membatasi resiko pada tingkat yang sedemikian rupa. Ketidakpastian yang ada pada resiko deteksi ini timbul karena auditor memilih suatu prosedur audit yang keliru atau menerapkan secara salah suatu prosedur audit yang benar, atau mungkin juga menafsirkan secara salah satu hasil audit. Ketidakpastian ini dapat dikurangi melalui perencanaan dan supervisi yang memadai serta pelaksanaan praktek audit yang sesuai dengan standart pengendalian mutu.

Sifat, luas usaha, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas dari satuan usaha, sedangkan supervisi mencakup pengarahan pada akuntan yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut dapat dicapai. Ada beberapa unsur supervisi antara lain : tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, mereview pekerjaan yang dilaksanakan dan menyelesaikan perbedaan pendapat diantara staf audit akuntan publik.

Efektifitas dari prosedur audit dan penerapannya, bukanlah suatu obyek yang dapat diukur dengan mudah dengan suatu ukuran yang baku. Karena akuntan yang diukur adalah suatu kebijakan yang diambil seorang auditor dalam upayanya untuk mengefektifkan prosedur agar menekan tingkat resiko, dalam hal ini resiko deteksi audit, yang nantinya akan memadai menurut pertimbangan profesionalnya untuk menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan. Karena itulah orientasi pada hal-hal yang mengacu atau berkaitan dengan kegiatan audit atau pemeriksaan tentu akan memberikan sumbangan terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit, contohnya melalui pengertian yang baik mengenai definisi audit, tipe-tipe dari resiko audit dan pemahaman terhadap resiko deteksi audit. Sedangkan yang berkaitan dengan orientasi pada kemampuan diri akuntan, contohnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan seseorang harus dapat mengukur kemampuan diri yang disebut mawas diri, rasa percaya diri, profesionalisme, inisiatif dan hal-hal yang lain yang akan memotivasi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu pada orientasi pada kemampuan staf akuntan, pada partisipasinya dalam

memberikan pendapat pada akhir pelaksanaan audit sebagai latihan atas sikap profesionalnya dan latar belakang pendidikannya serta pengalaman dari seorang akuntan di pandang turut memberi pengaruh terhadap efektifnya atau berhasilnya pelaksanaan prosedur audit. Dan hubungan seperti yang telah disebutkan diatas cukup menarik untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul Skripsi : “PENGARUH ORIENTASI KEGIATAN AUDIT DAN KEMAMPUAN DIRI AKUNTAN TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SURABAYA”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah orientasi kegiatan audit dan kemampuan diri akuntan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam suatu pemeriksaan ?
2. Apakah orientasi kegiatan audit berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam suatu pemeriksaan ?
3. Apakah orientasi kemampuan diri akuntan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam suatu pemeriksaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu : untuk mengetahui pengaruh orientasi pada kegiatan audit dan orientasi pada kemampuan diri akuntan atau staf akuntan terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam suatu pemeriksaan pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil yang ingin dicapai berdasar tujuan penelitian diatas diharapkan dapat berguna bagi :

1. Kalangan akademisi : digunakan sebagai informasi mengenai efektifitas prosedur audit dan penerapannya.
2. Kalangan praktisi : bermanfaat untuk perkembangan konsep supervisi dan perencanaan dalam auditing pada KAP di Surabaya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penulisan Skripsi ini disajikan dalam 5 Bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, dimana dalam bab ini diketahui teori-teori yang mendukung penelitian ini. Oleh karena itu, bab ini akan menguraikan tentang pengertian *auditing*, tipe dan

hirarki akuntan, pengertian orientasi kegiatan audit, kemampuan diri akuntan, efektifitas pelaksanaan prosedur audit, prosedur dan tipe prosedur, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN, membahas tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, variable penelitian dan definisi operasional variable, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, dimana pelaksanaan dan analisis hasil penelitian merupakan inti dari kegiatan penelitian ini. Secara garis besar berisi tentang penyajian data yang terkumpul, analisis data yang digunakan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN, merupakan bagian penutup yang akan mengikhtisarkan kesimpulan yang dapat diambil dari temuan penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan dan saran.